

RINGKASAN

M. Andrian Putra Efendi 2025, Peran Satpol PP Dalam Implementasi Perda No. 6 Tahun 2021 Tentang Penertiban PKL Angkringan Di Kota Probolinggo (Studi Kasus Pkl Jl. Suroyo Kota Probolinggo).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dengan fokus pada penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) angkringan di kawasan Jalan Suroyo. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana Satpol PP menjalankan fungsinya dalam menegakkan perda tersebut, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP menjalankan peran utamanya melalui tiga pendekatan: (1) penegakan hukum administratif seperti teguran dan pembongkaran lapak, (2) pembinaan berupa sosialisasi dan penyuluhan, serta (3) pendekatan humanis dengan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi PKL. Namun, implementasi kebijakan ini dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan sumber daya, resistensi dari PKL, dan kurang optimalnya koordinasi lintas instansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Satpol PP telah berupaya menjalankan peran strategis dalam menegakkan perda secara persuasif dan represif, efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui kolaborasi antarlembaga, penyediaan lokasi relokasi yang memadai, dan peningkatan partisipasi PKL dalam proses perumusan kebijakan.

Kata kunci: Satpol PP, PKL Angkringan, Implementasi Kebijakan, Jalan Suroyo

SUMMARY

M. Andrian Putra Efendi 2025. **The Role of Civil Service Police Unit (Satpol PP) in the Implementation of Regional Regulation No. 6 of 2021 on the Control of Street Food Vendors (Angkringan) in Probolinggo City (Case Study: Angkringan Vendors on Jl. Suroyo, Probolinggo City).**

This study aims to analyze the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Probolinggo City in implementing Regional Regulation (Perda) No. 6 of 2021 concerning Public Order, focusing on the control of street food vendors (angkringan) along Jl. Suroyo. The main issues explored are how Satpol PP carries out its functions in enforcing the regulation and the challenges encountered in the process.

The study employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that Satpol PP carries out its role through three main approaches:

(1) administrative law enforcement, including warnings and dismantling of vendor stalls, (2) community guidance through socialization and counseling, and (3) a humanistic approach that considers the socio-economic conditions of the vendors. However, the implementation of this policy faces challenges such as limited resources, resistance from vendors, and suboptimal inter-agency coordination. The study concludes that although Satpol PP has made efforts to enforce the regulation through both persuasive and repressive measures, the effectiveness of its implementation still needs improvement through stronger inter-agency collaboration, provision of adequate relocation sites, and greater vendor participation in the policy-making process.

Keywords: Civil Service Police Unit, Street Food Vendors, Policy Implementation, Jl. Suroyo